

FIRM CHARACTERISTICS, SHARIAH GOVERNANCE AND CREDIT (FINANCING) RISK

¹Yuni Utami, ²Abdulloh Mubarak

E-mail: mubarokfeups@gmail.com

^{1,2} *Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal*

ABSTRACT

The objectives of the study are to obtain empirical findings (1) the influence of firm characteristics (ownership structure, profitability, firm size, corporate leverage) on shari'ah governance. (2) the influence of shari'ah governance on credit risk (financing risk). Shari'ah governance, as a mechanism for ensuring shari'a compliance, is being the concern of various parties (regulators, industry players, consultants and researchers). Thus this research is expected to contribute on how the implementation of shari'ah governance, determinant and impact.

The research objectives were achieved by SEM model of Partial Least Square (SmartPLS v.3.2.6). The PLS model is a powerful soft modeling that can be applied to any data scale, does not require many assumptions and the sample size is not too large.

The results of model fit test show that there are only three variables that fit to influence shari'ah governance: ownership structure, profitability and company size. While the analysis of the three factors is only two factors that proved to influence shari'ah governance: the ownership structure and the firm size. The ownership structure has shown to negatively affect the implementation of shari'ah governance. Firm size proved to positively affect the implementation of sharia governance. While the leverage and profitability did not influence the implementation of shari'ah governance. Shariah governance is also to have no effect on financial risk

Keywords: *Shari'ah Governance, ownership structure, profitability, firm size, credit (financial) risk*

Penelitian bertujuan memperoleh temuan empiris (1) ada tidaknya pengaruh karakteristik perusahaan (struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage perusahaan) terhadap shari'ah governance. (2) ada tidaknya pengaruh shari'ah governance terhadap resiko kredit (pembiayaan). Shari'ah governance, sebagai suatu mekanisme untuk memastikan kepatuhan syariah, sedang menjadi perhatian berbagai kalangan (regulator, pelaku industri, konsultan dan peneliti). Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberi kontribusi tentang bagaimana praktek penerapan syari'ah governance, faktor yang mempengaruhi dan dampaknya.

Tujuan penelitian dicapai dengan teknik SEM model Partial Least Square (SmartPLS v.3.2.6). Model Partial Least Square (PLS) merupakan soft modeling yang powerful, yaitu dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. Dengan karakteristik tersebut maka penelitian dapat menggunakan model SEM-PLS.

Hasil pengujian kecocokan model menunjukkan hanya ada tiga variabel yang fit mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran perusahaan. Sementara dari hasil analisis tiga faktor tersebut hanya dua faktor yang terbukti mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbukti mempengaruhi secara negatif penerapan syariah governance di

perusahaan, khususnya di perbankan syariah. Ukuran perusahaan juga terbukti mempengaruhi secara positif terhadap penerapan syariah governance. Adapun untuk faktor leverage dan profitabilitas, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh terhadap tingkat penerapan syariah governance. Syariah governance juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap resiko pembiayaan.

Kata kunci: *Shari'ah Governance*, struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran Perusahaan, resiko kredit (pembiayaan).

1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini perhatian terhadap Shari'ah governance mengalami peningkatan. Shari'ah governance mendapat perhatian baik oleh regulator, pelaku industri, konsultan dan peneliti seiring dengan tumbuh dan berkembangnya industri keuangan shari'ah (Kasim et al., 2013a). Mereka konsen terhadap Syariah governance karena Industri keuangan ini mendasarkan pada konsep dan pondasi keuangan yang sama sekali berbeda dengan industri keuangan konvensional. Keuangan konvensional mendasarkan pada konsep pinjam meminjam (*lending-borrowing*) sehingga akan selalu terkait dengan bunga (*interest*), ketidakpastian (*uncertainty*) dan perjudian (*gambling*). Sementara keuangan syariah mendasarkan pada prinsip syariah yang diantaranya melarang ketiga praktek tersebut di atas.

Terkait dengan konsep shari'ah governance dan corporate governance, beberapa pihak tidak membedakan antara dua konsep tersebut. Ramli, et al., (2014), misalnya, menjelaskan bahwa tema Shari'ah Governance masuk dalam domain Corporate Governance. Sementara Wardayati (2011), El Junusi (2012) dan Purnamasari dan Darma (2015) mengartikan Shari'ah Governance sebagai sistem corporate governance yang ada diperbankan shari'ah. Pengertian corporate governance (GCG) pada perbankan shari'ah menggabungkan dua konsep yaitu corporate governance secara umum (universal) dan corporate governance tentang kepatuhan shari'ah (*shari'ah compliance*).

Dalam praktek implementasi shari'ah governance, beberapa ilmuwan mengkritik lemahnya penerapan shari'ah governance dalam industri keuangan shari'ah (Abdul Aziz, 2012). Mereka mengkritik tidak adanya perbedaan antara praktek industri keuangan syariah dan industri keuangan konvensional (Ahmad, 2010). Industri keuangan syariah juga mengalami dampak dari krisis keuangan seperti yang dialami industri keuangan konvensional. Di beberapa negara pernah terjadi kasus penutupan lembaga keuangan syariah antara lain penutupan Ikhlas Finance House di Turki, the Islamic Bank of South Africa dan Islamic Investment Companies of Egypt (Hasan, 2012). Di Indonesia, khususnya di tahun

2012, pernah terjadi kasus penyaluran kredit fiktif yang melibatkan tiga pejabat internal Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor (<http://stabilitas.co.id>).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi corporate governance atau syariah governance. Salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Beberapa variabel karakteristik perusahaan tersebut antara lain struktur kepemilikan (Melyoki, 2005; Lee dan Park, 2008; Hafeez, 2013; Ramli, et al., 2014; Eliada et al., 2015), kualitas audit (Werapong et al., 2008), ukuran perusahaan (Ben-Amar dan Ameer, 2006; Khanchel, 2007; Cheung et al., 2008; Lee dan Park, 2008; Werapong et al., 2008; Hartono et al., 2013; Wan Abdullaha et al., 2015; Eliada et al., 2015), profitabilitas (Brown dan Caylor, 2004; Black et al., 2006; Hartono et al., 2013; Eliada et al., 2015) dan leverage (Black et al., 2003; Brown dan Caylor, 2004; Silveira et al., 2007; Hartono et al., 2013 dan Eliada et al., 2015).

Melyoki (2005) dan Eliada et al. (2015) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang ditandai dengan keberadaan pemegang saham mayoritas (pengendali) dan kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat kontrol perusahaan. Tingkat kontrol ini merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas corporate governance. Namun penelitian Lee dan Park (2008) menemukan bahwa pemegang saham cenderung berperilaku resisten terhadap corporate governance yang akan memantau dan memeriksa keputusan mereka. Mereka berusaha menikmati keuntungan pribadi tanpa ingin dipantau oleh investor luar. Ramli, et al. (2014) membandingkan tingkat pengungkapan shari'ah governance antara perbankan shari'ah yang dimiliki asing dan domestik dan menemukan bahwa perbankan shari'ah yang dimiliki pemegang saham domestik lebih baik dibandingkan asing. Kualitas audit, yang ditandai dengan penggunaan KAP empat besar dunia, juga cenderung mempengaruhi secara positif penerapan corporate governance (Werapong et al., 2008 dan Eliada et al., 2015). Sementara temuan ukuran perusahaan menyimpulkan hasil berbeda. Ben-Amar dan Ameer (2006), Khanchel (2007), Cheung et al., (2008), Werapong et al. (2008), Hartono et al. (2013) dan Wan Abdullaha et al. (2015) menemukan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penerapan corporate governance, sedangkan Eliada et al., 2015 tidak. Temuan yang berbeda juga terjadi pada profitabilitas dan leverage. Untuk profitabilitas, Brown dan Caylor (2004), Eliada et al., (2015) dan Black et al. (2006) menemukan pengaruh positif sementara Hartono et al., (2013) dan Eliada et al., 2015 tidak menemukan pengaruh. Untuk leverage, Black et al. (2003), Brown dan Caylor (2004) dan Silveira et al., (2007) menemukan pengaruh positif leverage terhadap corporate governance, sementara temuan Hartono et al., (2013) tidak menemukan pengaruh positif, adapun Eliada et al., 2015 menemukan hasil negatif

Beberapa kajian sebelumnya juga mencoba menginvestigasi hubungan antara shari'ah governance atau corporate governance dengan resiko kredit (Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 2012; Nyor dan Mejabi, 2013; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016). Secara umum temuan penelitian Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016 menyimpulkan adanya pengaruh negatif penerapan corporate governance terhadap resiko kredit. Sementara Nyor dan Mejabi (2013) tidak menemukan pengaruh signifikan corporate governance terhadap resiko kredit.

Mendasarkan pada temuan penelitian yang beragam di atas dan saran penelitian Ramli et al. (2014), penulis tertarik untuk menginvestigasi kembali pengaruh karakteristik perusahaan terhadap shari'ah governance dan dampaknya pada resiko kredit (pembiayaan). Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Hariani, 2011), penelitian ini mencoba memasukan indikator dewan pengawas syariah yang menjadi ciri utama corporate governance lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga menggunakan indikator (proksi) pada setiap variabel dengan lebih banyak. Karakteristik perusahaan yang dianalisis antara lain struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage, adapun subjeknya adalah bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah karakteristik perusahaan: struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap shari'ah governance. (2) Apakah shari'ah governance berpengaruh terhadap resiko kredit (pembiayaan)

2. LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Shari'ah Governance

Beberapa penulis tidak membedakan antara konsep corporate governance dan syariah governance (Wardayati, 2011; El Junusi, 2012; Purnamasari dan Darma, 2015). Mereka mengartikan Shari'ah Governance sebagai sistem corporate governance yang ada diperbankan shari'ah. Pengertian corporate governance (GCG) pada perbankan shari'ah menggabungkan dua konsep yaitu corporate governance secara umum (universal) dan corporate governance tentang kepatuhan shari'ah (*shari'ah compliance*).

Terkait dengan definisi corporate governance, secara umum ada dua: definisi secara sempit dan secara luas (Hasan, 2009). Secara sempit corporate governance diartikan sebagai sistem pertanggungjawaban secara formal dari manajemen senior terhadap pemegang saham. Sementara dalam arti luas, corporate governance bukan hanya jaringan hubungan antara perusahaan dan pemegang saham tetapi juga antara perusahaan dan pemangku kepentingan

lainnya seperti karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur (Feizizadeh, 2012). Adapun shari'ah governance diartikan oleh IFSB sebagai satu set pengaturan kelembagaan dan organisasi melalui mana lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif atas shari'ah compliance pada setiap struktur dan proses seperti penerbitan pernyataan shari'ah yang relevan, desimnasi pernyataan shari'ah tersebut, review atas internal shari'ah compliance dan review atas an annual shari'ah compliance (Kasim et al., 2013a).

Beberapa institusi telah menyusun pedoman shari'ah governance, diantaranya Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Bank Negara Malaysia (BNM) (Kasim et al., 2013a). AAOIFI menerbit standar corporate governance yang dikenal dengan AAOIFI Shari'ah governance guidelines. Ada tujuh standar syariah governance yaitu 1) Supervisory Board: Appointment, Composition and Report, 2) Shari'ah Review, 3) Internal Shari'ah Review, 4) Audit & Governance Committee for Islamic Financial Institutions, 5) Independence of Shari'ah Supervisory Boards, 6) Statement on Governance Principles for Islamic Financial Institutions, 7) Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions. IFSB merumuskan lima prinsip (pedoman) shari'ah governance, yaitu 1) general approach to Shari'ah governance system, 2) competency, 3) independency, 4) confidentiality dan 5) consistency. Sementara BNM merumuskan kerangka shari'ah governance yang secara umum didiskusikan dalam enam bagian yaitu 1) the general requirement oversight, 2) accountability and responsibility, 3) independence, 4) competency, 5) confidentiality and Shari'ah compliance dan 6) research function. Di Indonesia, penerapan shari'ah governance perbankan shari'ah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009. Peraturan ini menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bagi perbankan dan bisnis syariah, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan fairness.

Keberadaan corporate governance dapat dijelaskan dengan beberapa teori atau model. Teori atau model ini secara umum terbagi dua pendekatan (pandangan), yaitu pandangan konvensional (*Corporate Governance in Western/Conventional/Mainstream Perspectives*) dan pandangan Islam (*Corporate overnance in Islamic Perspectives*) (Choudhury dan Hoque, 2006; Hasan, 2012 dan Hafeez, 2013).

Prinsip-prinsip model corporate governance konvensional secara umum mendasarkan pada utilitarianisme, relativisme dan universalisme. Prinsip-prinsip ini bersumber dari etika filosofis yang dibangun dari interaksi sosial. Semua prinsip-prinsip corporate governance barat seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan dan tanggung jawab sosial dibangun melalui

rasionalitas dan pengalaman manusia (Hasan, 2012). Corporate governance barat menekankan pada beberapa hal antara lain monitoring secara efektif, manajemen secara efisien, sistem pengendalian internal dan manajemen resiko yang baik. Perhatian ini dapat diciptakan melalui dewan direksi yang kompeten dan bebas dari konflik kepentingan dan memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjalankan urusan perusahaan (Hafeez, 2013)

Secara umum keberadaan corporate governance konvensional dilandasi beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain *agency theory*, *stakeholder theory*, *resources dependency theory* (Bowrin et al., 2007; abdullah dan valentine 2009; Yusoff dan Alhaji, 2012), *transaction cost theory* (Bowrin et al., 2007; abdullah dan valentine, 2009), *stewardship theory*, *political theory* (abdullah dan valentine 2009; Yusoff dan Alhaji, 2012), *social contract theory*, *legitimacy theory* (Yusoff dan Alhaji, 2012) dan beberapa teori etik seperti *business ethics theory*, *virtue ethics theory*, *feminist ethics theory*, *discourse ethics theory* dan *postmodern ethics theory* (Abdullah dan Valentine 2009).

Berbeda dengan pandangan corporate governance konvensional, pandangan corporate governance Islam mendasarkan prinsip tauhid (Choudhury dan Hoque (2006) yang dijabarkan dalam dua sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hasan, 2012). Shari'ah Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif mulai dari bagaimana menangani transaksi ekonomi sampai perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial. Prinsip-prinsip corporate governance Islam dijabarkan dalam tiga dimensi pengambilan keputusan: 1) oleh siapa, yaitu dengan konsultasi timbal balik melalui sistem Syura atau Dewan Konsultatif, 2) Untuk siapa, yaitu tujuan akhir dari setiap aktivitas perusahaan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan pihak-pihak pembuat keputusan di bumi sebagai wakil Allah SWT yang diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan umat-Nya dan 3) dengan siapa dan untuk siapa, yaitu keputusan corporate governance mensyaratkan pengawasan secara efektif untuk memastikan kesesuaian semua operasi dan prosedur dengan ketentuan shari'ah (Hafeez, 2013).

2.2. Perumusan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap shari'ah governance

Struktur kepemilikan dapat menggambarkan posisi dan peran pemegang saham dalam perusahaan. Dalam teori keagenan, investor dengan persentase kepemilikan saham tertentu dapat mengarahkan agar agen (manajemen) bertindak sesuai kepentingannya. Dalam kasus shari'ah governance, investor tersebut dapat mengarahkan manajemen agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi penerapan corporate governance. Penelitian Eliada et al., (2015), misalnya, menemukan bahwa kepemilikan institusional, sebagai proksi struktur kepemilikan, berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan shari'ah governance. Tingkat pengungkapan ini lebih tinggi pada perbankan syariah yang dimiliki pemegang saham domestik dibandingkan asing (Ramli, et al., 2014). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap efektifitas penerapan Shari'ah Governance

2.2.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Shari'ah Governance

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya yang tersedia. Profitabilitas yang tinggi cenderung meningkatkan cash flow perusahaan. Dalam teori keagenan, tingginya cashflow profit cenderung disalahgunakan manajemen, sehingga memancing pemegang saham mengeluarkan biaya keagenan berupa bonding cost.

Penelitian Al- Haddad et al. (2011) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan corporate governance. Pengaruh profitabilitas terutama terjadi dalam jangka panjang (Black et al., 2006). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan Shari'ah Governance

2.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Shari'ah Governance

Penelitian sebelumnya menjelaskan terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dan penerapan penerapan corporate governance (Al- Haddad et al. 2011 dan Hartono et al.2013, Wan Abdullaha et al. (2015). Temuan ini mendukung teori hipotesis biaya politik (Hartono et al.2013). Perusahaan besar cenderung melakukan mekanisme corporate governance yang lebih baik dalam bentuk pengungkapan informasi yang lebih banyak dan detail. Sementara perusahaan kecil enggan mengungkapkan informasi secara detail karena merasa hanya akan merugikan dalam persaingan. Perusahaan besar lebih sensitif terhadap biaya politik yang berakibat akan memberikan informasi lebih untuk mengurangi kritik publik atau intervensi pemerintah (Raffournier, 1995). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan Shari'ah Governance.

2.2.4. Pengaruh Leverage terhadap Shari'ah Governance

Penetapan utang perusahaan dalam teori keagenan merupakan mekanisme yang dilakukan pemilik untuk membatasi kewenangan manajemen dalam mengelola cashflow perusahaan. Kajian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan dengan corporate governance (Black et al. 2003; Brown dan Caylor, 2004; Mohammed et al.,2009; Silveira et al., 2007; dan Eliada et al. 2015). Leverage dalam hal ini menggambarkan tingkat pengaruh kreditor yang tertarik melakukan fungsi control perusahaan untuk memastikan kepentingannya (Hartono et al.2013). Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap efektifitas penerapan Shari'ah Governance.

2.2.5. Pengaruh shari'ah governance terhadap resiko kredit (pembiayaan)

Perbankan syariah memiliki resiko kredit yang lebih besar dibandingkan perbankan konvensional. Resiko kredit ini terutama terjadi pada kegiatan dengan pembiayaan model profit loss sharing (PLS) seperti Musyarakah, Mudharabah, Salam dan Istisna. Resiko ini dapat dikurangi dengan penetapan mekanisme corporate governance seperti penetapan jaminan dan proporsi yang seimbang antara kontrak berbasis PLS atau non PLS (murabahah) (Bourakba dan Zerargui, 2015).

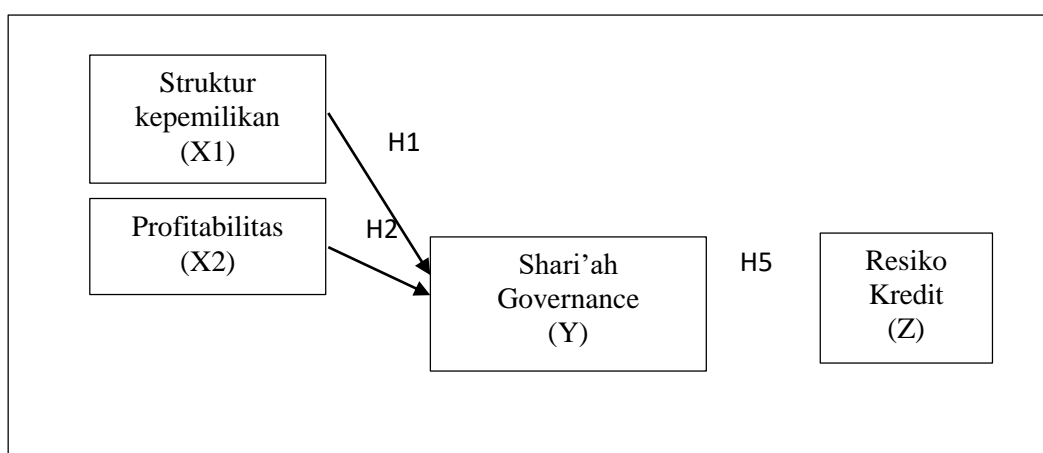
Penelitian sebelumnya menyimpulkan adanya pengaruh negatif penerapan corporate governance terhadap resiko kredit (Rinaningih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016). Hal ini berarti implementasi corporate governance dapat mengurangi resiko kredit suatu perbankan. Berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan tema penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

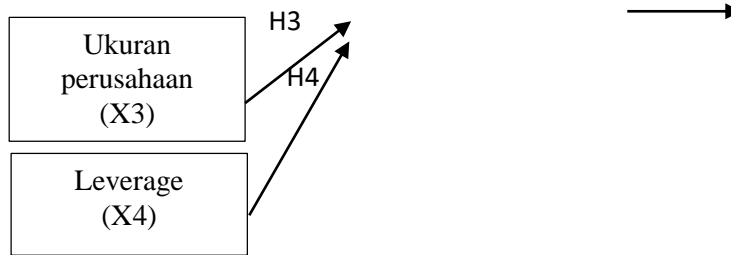
H5 : shari'ah governance berpengaruh negatif terhadap resiko kredit (pembiayaan)

2.3.Pengembangan Model

Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1. Model Penelitian





3. METODE PENELITIAN

3.1. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dengan kurun waktu sejak bank syariah tersebut menerbitkan laporan keuangan dan tercatat di Bank Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) sampai dengan tahun 2015. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria bahwa data untuk perhitungan karakteristik perusahaan, shari'ah governance dan resiko kredit lengkap selama pengamatan.

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage (karakteristik perusahaan), shari'ah governance dan resiko kredit. Penjelasan rinci masing-masing variabel di atas sebagai berikut:

1. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan menggambarkan proporsi kepemilikan saham oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan diukur dengan beberapa indikator antara lain (Poudel dan Hovey (2012); Bourakba dan Zerargui, 2015; Othman, 2015; Mnasri, 2015; Fitri BS dan Subroto, 2013): (a) Kepemilikan Terkonsentrasi (*Ownership Concentration/Block-Holders*) diukur dalam bentuk variabel dummy, dengan memberi skor 1 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan terkonsentrasi (>50%) dan skor 0 untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham menyebar. (b) Kepemilikan Asing (*Foreign Ownership*), diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki pihak asing dengan total saham yang beredar (%). (c) Kepemilikan Institusi (*Institutional Ownership*) diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan dengan total saham yang beredar (%). (d) Kepemilikan Manajerial (*Management ownership*), diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen (manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen) dan direksi) dengan total saham yang beredar (%)

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari sumber daya yang tersedia. profitabilitas diukur dengan beberapa indikator antara lain (Hebble dan Ramaswamy, 2005; Muhamad et al, 2009; Eliada et al., 2015; Azzoz dan Khamees, 2016): (a) Return on Assets (ROA), yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. (b) Return on Equity (ROE), yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. (c) Net Profit Margin (NPM), yaitu laba bersih dibagi total pendapatan. (d) Net Income, yaitu laba bersih periode berakhir 31 Desember tahun t pada perbankan syariah i

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain (Hebble dan Ramaswamy, 2005; Muhamad et al, 2009; Al- Haddad, 2011; Bourakba dan Zerargui, 2015; Azzoz dan Khamees. 2016): (a) Log Total Assets, yaitu total aset perbankan syariah i per 31 Desember tahun t. (b) Log Total Earning, yaitu total pendapatan perbankan syariah i pada periode berakhir 31 Desember tahun t. (c) Log Equity, yaitu total ekuitas perbankan syariah i per 31 Desember tahun t. (d) Log Employees, yaitu total karyawan perbankan syariah i per 31 Desember tahun t.

4. Leverage

Leverage merupakan gambaran seberapa besar aktiva dibiayai dengan hutang. Leverage diukur dengan beberapa indikator, antara lain (Hebble dan Ramaswamy (2005; Muhamad et al, 2009; Al- Haddad, 2011): (a) Debt Equity Ratio (DER), yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. (b) Debt Ratio (DR), yaitu total hutang dibagi dengan total aset

5. Shari'ah Governance

Shari'ah governance merupakan mekanisme corporate governance pada lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) yang menggabungkan corporate governance universal dan kepatuhan syariah. Shari'ah governance diukur dengan beberapa indikator antara lain (Muhamad et al, 2009; Poudel dan Hovey, 2012; Fitri BS dan Subroto, 2013 Bourakba dan Zerargui, 2015; Azzoz dan Khamees, 2016; Ahmad et al., 2016, Rama dan Novela, 2015; Othman, 2015).

a) Karakteristik Dewan Komisaris, meliputi: (1) Ukuran dewan komisaris (*Board Size*), dikur dengan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. (2) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (*Board Diligence/Board Activity*), diukur dengan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. (3) Independensi Dewan Komisaris (*Board Composition/Board independence*), diukur dengan membagi jumlah anggota komisaris independent

dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris. (4) Struktur Kepemimpinan Dewan Komisaris (*the board leadership structure/CEO Duality*), diukur dengan variabel dami, dimana diberi nilai 1 jika ada anggota dewan yang rangkap jabatan (CEO sekaligus Chairman), sedangkan dinilai 0 jika sebaliknya.

- b) Karakteristik Komite Audit, meliputi: (1) Ukuran Komite Audit (*Audit Committee Size*), diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan. (2) Independensi Komite Audit (*Audit Committee Composition/Independence*), diukur dengan membagi jumlah komite audit independen dengan total komite audit. (3) Frekuensi Rapat Komite Audit (*Audit committee's diligence/Audit Committee Activity*), diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dalam satu tahun. (4) Kompetensi Komite Audit (*Audit Committee Competency*), diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang dan keahlian dalam bidang perbankan syari'ah.
- c) Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), meliputi: (1) Ukuran DPS (*Shari'ah Supervisory Board Size*), diukur dengan jumlah anggota DPS. (2) Kompetensi DPS (*Shari'ah Supervisory Board Competency*), diukur dengan membagi jumlah anggota DPS yang memiliki keahlian bank dengan total keanggotaan DPS. (3) Frekuensi Rapat DPS (*Shari'ah Supervisory Board Activity*), diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan DPS dalam satu tahun.

6. Resiko Kredit (Pembiayaan)

Resiko kredit merupakan risiko perbankan yang timbul dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko kredit diukur dengan beberapa indikator antara lain (Sudiyatno dan Fatmawati, 2013; Muliawat dan Khoiruddin, 2015; Azzoz dan Khamees, 2016): (a) Non Performing Financing (NPF), yaitu perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. (b) Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank tersebut

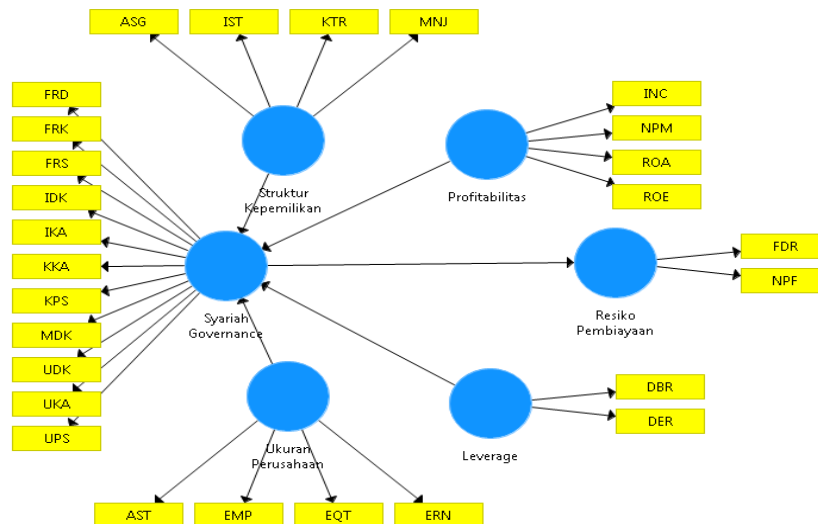
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara membaca dan menganalisis laporan keuangan dan laporan tahunan, menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data diambil dari beberapa sumber antara lain buku, majalah, laporan keuangan dan laporan tahunan baik melalui situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/>), Otoritas Jasa Keuangan

(<http://www.ojk.go.id/>), situs internet masing-masing bank syariah, ataupun perpustakaan dari masing-masing institusi tersebut.

Untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator dan menguji hipotesis penelitian, penelitian ini menggunakan teknik SEM dengan model Partial Least Square (SmartPLS v.3.2.6) (Wiyono, 2011). Adapun model struktural pengujian hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan dalam gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1. Model Model Struktural Pengujian Hipotesis Penelitian



Keterangan:

Struktur Kepemilikan

- KTR Kepemilikan Terkonsentrasi
- ASG Kepemilikan Asing
- IST Kepemilikan Institusi
- MNJ Kepemilikan Manajerial

Profitabilitas

- ROA Return on Assets
- ROE Return in Equity
- NPM Net Profit Margin
- INC Net Income

Ukuran Perusahaan

- AST Total Assets
- ERN Total Earning
- EQT Equity
- EMP Jumlah Karyawan

Leverage

- DER Debt Equity Ratio

- DBR Debt Ratio

Shari'ah Governance

- UDK Ukuran Dewan Komisaris
- FRD Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- IDK Independensi Dewan Komisaris
- MDK Struktur Kepem. Dewan Komisaris
- UKA Ukuran Komite Audit
- IKA Independensi Komite Audit
- FRK Frekuensi Rapat Komite Audit
- KKA Kompetensi Komite Audit
- KPS Kompetensi DPS
- FRS Frekuensi Rapat DPS
- UPS Ukuran DPS

Resiko Pembiayaan

- NPF Non Performing Financing
- FDR Financing to Deposit Ratio

Berdasarkan output PLS tersebut kemudian dilakukan uji model berupa uji indikator (*outer model*) dan uji hipotesis (*Inner model*). Beberapa Uji indikator antara lain *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)* dan *composite reliability*. Sementara uji hipotesis antara lain dengan menganalisis persentase varian (R²), koefisien parameter dan T-Statistik (Wiyono, 2011: 403).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

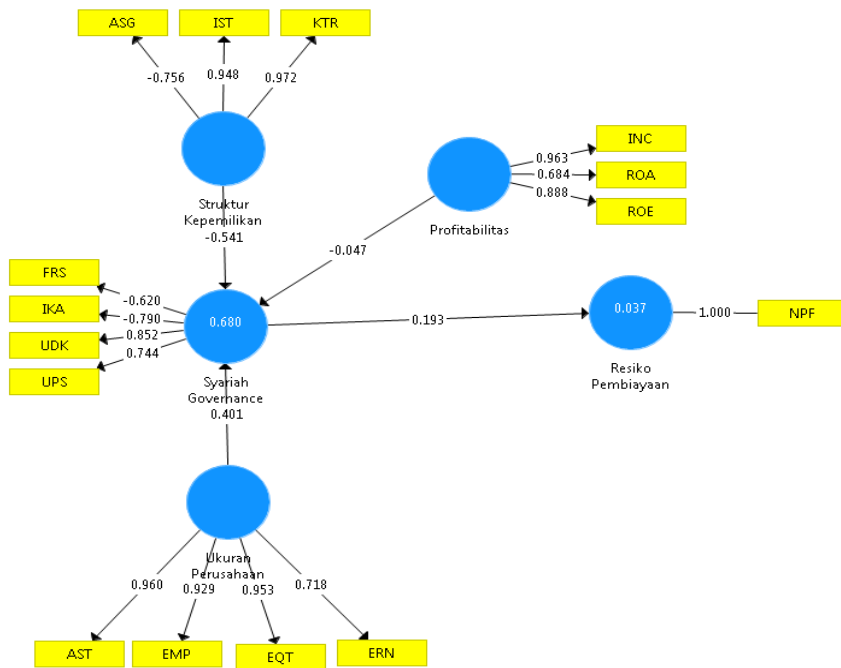
4.1. Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah di Indonesia. Proses seleksi menghasilkan 10 sampel bank umum syariah dengan 65 pengamatan. Data sampel seluruh pengamatan yang dijabarkan dalam masing-masing indikator untuk setiap variabel laten.

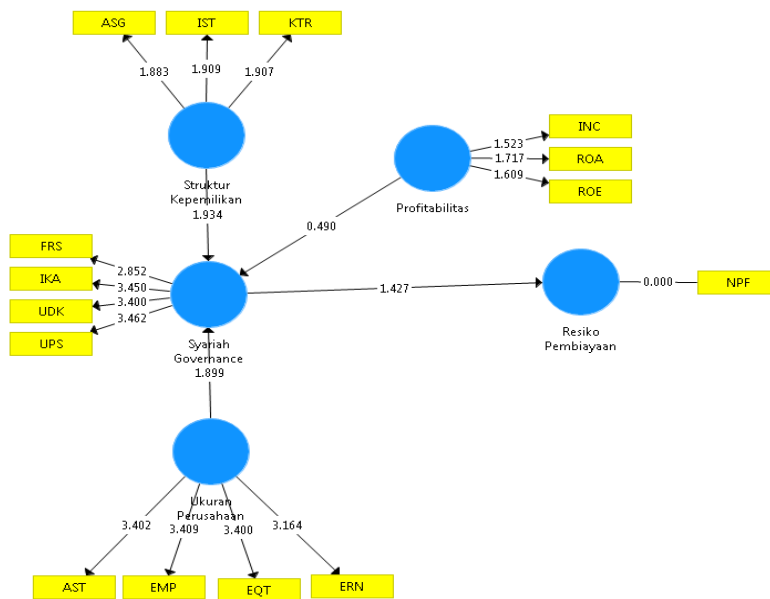
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan menggunakan teknik SEM dengan model Partial Least Square (SmartPLS v.3.2.6). Sebelum melihat dan menganalisis hasil pengujian hipotesis, perlu dilakukan pengujian indikator (uji validitas dan reliabilitas) untuk mengetahui sejauh mana indikator tersebut menjelaskan variabel latennya. Hasil uji dalam bentuk grafik dan tabel (Outer Loadings (Convergent Validity), Average Variance Extracted (AVE) dan Composite Reliability) menunjukkan beberapa indikator dan variabel laten tidak memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Indikator (Convergent Validity) yang tidak valid harus dihilangkan dari pengamatan dan dihapus dari model penelitian, kemudian dilakukan kalkulasi ulang (Haryono, 2017). Hasil kalkulasi ulang penyusunan dan pengujian model tampak pada Gambar 4.1 (Hasil Uji Algoritma) dan Gambar 4.2 (Hasil Uji Bootstrapping) di bawah ini.

Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 menunjukkan hanya ada tiga variabel yang mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Variabel leverage bukan merupakan faktor yang mempengaruhi syariah governance. Variabel laten Struktur Kepemilikan hanya memiliki indikator Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusi, sedangkan Kepemilikan Manajerial dikeluarkan dari indikator struktur kepemilikan. Variabel profitabilitas yang sebelumnya memiliki empat indikator (Return on Assets; Return in Equity; Net Profit Margin; Net Income), hasil pengujian indikator menyimpulkan hanya tiga indikator yang menjelaskan

Gambar 4.1. Grafik Hasil Uji Algoritma PLS



Gambar 4.2. Grafik Hasil Uji Bootstrapping PLS



variabel profitabilitas (Return on Assets; Return in Equity; Net Income). Untuk indikator yang menjelaskan variabel Ukuran Perusahaan tidak mengalami pengurangan. Adapun untuk variabel laten Syariah Governance, hanya empat indikator yang disimpulkan merupakan proksi Syariah Governance, yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Frekuensi Rapat DPS dan Ukuran DPS. Tujuh indikator lainnya, yaitu Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, Kompetensi Komite Audit dan Kompetensi DPS disimpulkan bukan merupakan indikator Syariah Governance.

Hasil Uji Algoritma dan Bootstraping PLS (grafik dan tabel) dapat diringkas hasil uji hipotesis (inner model) seperti terlihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Hasil Uji
<u>Koefisien Determinasi (R²)</u>	
Resiko Pembiayaan	0,038
Syariah Governance	0,680
<u>P Values</u>	
Profitabilitas → Syariah Governance	0,624
Struktur Kepemilikan → Syariah Governance	0,054
Syariah Governance → Resiko Pembiayaan	0,154
Ukuran Perush. → Syariah Governance	0,058
<u>Koefisien Paramater</u>	
Profitabilitas → Syariah Governance	-0,047
Struktur Kepemilikan → Syariah Governance	-0,541
Syariah Governance → Resiko Pembiayaan	0,193
Ukuran Perush. → Syariah Governance	0,401

Nilai uji koefisien determinasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan mempengaruhi syariah governance sebesar 68,0%, sisanya 32% dipengaruhi faktor (variabel) lainnya yang tidak diamati. Sementara variabel syariah governance mempengaruhi resiko pembiayaan hanya sebesar 3,8%, sebagian besar sisanya (96,2%) dipengaruhi variabel lainnya.

Nilai uji P Value menjelaskan bahwa dari tiga variabel yang dianalisis (profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan), hanya struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan yang terbukti secara signifikan mempengaruhi syariah governance, adapun profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap syariah governance ($0,62 > 0,05$). Sementara variabel syariah governance juga terbukti tidak mempengaruhi resiko pembiayaan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi resiko pembiayaan (0,193) yang lebih besar dari 5%.

Nilai Koefisien Paramater menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap syariah governance (-0,541). Hal ini berarti semakin besar kepemilikan terkonsentrasi pada institusi dan asing semakin rendah tingkat penerapan syariah governance dan sebaliknya. Adapun ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap syariah governance. Artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi tingkat penerapan syariah governance.

Dikaitkan dengan hipotesis penelitian, secara umum hasil penelitian ini menolak hipotesis H2, H4 dan H5 dan mendukung H1 dan H3. Penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penerapan syariah governance. Demikian juga

pengaruh syariah governance terhadap resiko pembiayaan. Sebaliknya temuan penelitian konsisten dengan hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap syariah governance.

4.2.Pembahasan

Dari empat faktor yang diduga dan dianalisis (profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan) hanya dua faktor yang terbukti mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbukti mempengaruhi secara negatif penerapan syariah governance di perusahaan, khususnya di perbankan syariah. Dalam penelitian ini struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan terkonsentrasi, asing dan institusi. Ini berarti semakin tinggi struktur kepemilikan semakin rendah penerapan syariah governance. Semakin tinggi kepemilikan terkonsentrasi baik oleh asing atau institusi justru akan membatasi atau mengurangi penerapan syariah governance. Hasil ini konsisten dengan penelitian Ramli, et al., (2014) yang menemukan bahwa tingkat pengungkapan syariah governance lebih tinggi pada perbankan syariah yang dimiliki pemegang saham domestik dibandingkan asing.

Ukuran perusahaan juga terbukti mempengaruhi secara positif terhadap penerapan syariah governance. Ini berarti semakin besar perusahaan akan semakin patuh dan berusaha menerapkan syariah governance. Besarnya perusahaan terlihat dari nilai aset, ekuitas, laba atau jumlah karyawan yang dipekerjakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Al-Haddad et al. 2011 dan Hartono et al.2013, Wan Abdullaha et al. (2015). Temuan ini mendukung teori hipotesis biaya politik yang menyatakan perusahaan besar cenderung melakukan mekanisme corporate governance yang lebih baik dalam bentuk pengungkapan informasi yang lebih banyak dan detail. (Hartono et al.2013). Perusahaan besar lebih sensitif terhadap biaya politik yang berakibat akan memberikan informasi lebih untuk mengurangi kritik publik atau intervensi pemerintah (Raffournier, 1995).

Adapun untuk faktor profitabilitas dan leverage, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh terhadap tingkat penerapan syariah governance. Ini berarti tinggi rendahnya kinerja dan liabilitas yang dimiliki perusahaan bukan menjadi faktor yang menjadi pertimbangan manajemen untuk menerapkan syariah governance. Terkait leverage, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Black et al. 2003; Brown dan Caylor, 2004; Mohammed et al.,2009; Silveira et al., 2007; dan Eliada et al. 2015). Bagi kreditur, penerapan syariah governance bukan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman. Kreditur tidak tertarik melakukan fungsi control perusahaan guna memastikan kepentingannya (Hartono et al.2013). Terkait profitabilitas, temuan ini sejalan dengan Black

et al.. (2006) yang menyatakan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap corporate governance terutama terjadi dalam jangka panjang.

Syariah governance juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap resiko pembiayaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan adanya pengaruh negatif penerapan corporate governance terhadap resiko kredit (Rinaningsih, 2008; Hariani, 2011; Poudel dan Hovey, 2012; Bourakba dan Zerargui, 2015; Ahmad et al., 2016). Temuan ini menunjukkan bahwa syariah governance bukan mekanisme yang efektif untuk mengurangi resiko pembiayaan (kredit).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap efektivitas penerapan syariah governance dan pengaruh syariah governance terhadap resiko kredit (pembiayaan). Hasil pengujian kecocokan model menunjukkan hanya ada tiga variabel yang fit mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas dan dan ukuran perusahaan.

Dari tiga faktor yang diduga dan dianalisis (profitabilitas, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan) hanya dua faktor yang terbukti mempengaruhi syariah governance, yaitu struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbukti mempengaruhi secara negatif penerapan syariah governance di perusahaan, khususnya di perbankan syariah. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan terkonsentrasi baik oleh asing atau institusi justru akan membatasi atau mengurangi penerapan syariah governance. Ukuran perusahaan juga terbukti mempengaruhi secara positif terhadap penerapan syariah governance. Ini berarti semakin besar perusahaan akan semakin patuh dan berusaha menerapkan syariah governance. Besarnya perusahaan terlihat dari nilai aset, ekuitas, laba atau jumlah karyawan yang dipekerjakan. Adapun untuk faktor leverage dan profitabilitas, penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh terhadap tingkat penerapan syariah governance. Ini berarti tinggi rendahnya liabilitas dan kinerja yang dimiliki perusahaan bukan menjadi faktor yang menjadi pertimbangan manajemen untuk menerapkan syariah governance. Bagi kreditur, penerapan syariah governance bukan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman. Kreditur tidak tertarik melakukan fungsi control perusahaan guna memastikan kepentingannya. Temuan ini menunjukkan bahwa syariah governance bukan mekanisme yang efektif untuk mengurangi resiko pembiayaan (kredit).

5.2. Saran

Dalam pengumpulan data, penelitian ini hanya mendasarkan laporan tahunan yang dipublikasikan melalui internet. Beberapa perusahaan (bank) tidak mengungkapkan secara lengkap data penelitian tersebut. Oleh karena itu penelitian selanjutnya perlu memanfaatkan metode pengumpulan data lain seperti survey atau wawancara.

Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen (profitabilitas, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan) dan terbukti mempengaruhi syariah governance hanya sebesar 68,0%. Penelitian selanjutnya perlu menginvestigasi variabel atau faktor lain yang belum diamati seperti variabel makro atau regulasi pemerintah terkait perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2004. *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Abdullah, H. dan Valentine, B. 2009. Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance. *Middle Eastern Finance and Economics*. Issue 4, pp. 88-96
- Abdu Aziz, A.F. 2012. International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Malaysia. MPRA Paper No. 47772. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47772/>.
- Ahmad, P. 2010. The current economic crisis - Is Islamic finance a solution? AltMuslim. Retrieved 8 October 2011, from <http://www.altmuslim.com/a/a/a/3622>.
- Ahmad, M.I., Guohui, W., Hassan, M., Naseem, M.A. dan Rehman, R. 2016. NPL and Corporate Governance: A Case of Banking Sector of Pakistan. *Accounting and Finance Research*. Vol. 5, No. 2, pp. 32-41.
- Alsaeed, K.. 2006. The association between firm-specific characteristics and disclosure The case of Saudi Arabia. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 21, No. 5, pp. 476-496.
- Al- Haddad, W.M.Y., Alzurqan, S.T. dan Al Sufy, F.J. 2011. The Effect of Corporate Governance on the Performance of Jordanian Industrial Companies: An empirical study on Amman Stock Exchange. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 1 No. 4, pp. 55-69.
- Azzoz, A.R.A.M. dan Khamees, B.A. 2016. The Impact of Corporate Governance Characteristics on Earnings Quality and Earnings Management: Evidence from Jordan. *Jordan Journal of Business Administration*, Volume 12, No. 1, pp. 187-207.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Bourakba, C dan Zerargui, H. 2015. The relationship between credit risk and corporate governance in Islamic banking: An empirical study. *Issues in Business Management and Economics*. Vol.3 (4), pp. 67-73.
- Belkaoui, A. R. 2001. Level of Multinationality, Growth Opportunities, and Size as Determinants of Analyst Rating of Corporate Disclosure. *American Business Review*. Vol. 19, No. 2, pp. 115-120.
- Ben-Amar, W. dan Ameur, B. 2006. Factor Explaining Corporate Governance disclosure quality: Canadian Evidence, *Working Paper*
- Black, B., Jang, H. dan Kim. W. 2003. Predicting Firms Corporate Governance Choices: Evidence from Korea. <http://ssrn.com/>.

- Black, B., Jang, H. dan Kim, W. 2006. Does Corporate Governance Affect Firm Value? Evidence from Korea. <http://ssrn.com/>.
- Bowrin, A., VG Sridharan, F.N. dan Braendle, Udo C. 2007. Corporate Governance: The Theoretical Foundations of Corporate Governance. Virtus Interpress. Ukraina.
- Brown, L.D. dan Caylor, M.L. 2004. Corporate Governance and Firm Performance. *Working Paper*. Georgia State University,
- Chapra, M.U. dan Khan, T. 2000. *Regulation and supervision of Islamic banks*. Jeddah: Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute.
- Camfferman, K dan T. E. Cooke. 2002. An analysis of disclosure in the annual reports of U.K. and Dutch companies. *Journal of International Accounting Research*. Vol. 1, pp. 3-30
- Cheung, S.Y.L., Connelly, J.T., Limpaphayom, P., dan Zhou, L. 2009. Determinants of Corporate Disclosure and Transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand.
- Choudhury, M.A dan Hoque, M.Z. 2006. Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance*. Vol. 6 No. 2, pp. 116-128
- Eliada. Herwiyanti, R., Ayu. S.W. dan Ayu, A.R. 2015. Analysis of Factors Influencing the Islamic Corporate Governance Disclosure Index of Islamic Banks in Asia. *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*. Volume 3, Issue 4, pp. 192-197.
- El Junusi, R. 2012. Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir*, 12(1), 87-111.
- Feizizadeh, A. 2012. Corporate governance: Frameworks. *Indian Journal of Science and Technology*. Vol. 5 No. 9, pp. 3353-3361.
- Fitri BS, G. N., dan Subroto, B. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2)
- Habble, A. dan Ramaswamy, V. 2005. Corporate Governance And Firm Characteristics (The Sarbanes-Oxley Act Of 2002). *Journal of Business & Economics Research*, Vol. 3, No. 5, pp. 27-32.
- Hafeez, M.M. 2013. An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3, pp 98-103.
- Hariani, D. 2011. *Pengaruh Penerapan GCG terhadap Resiko Kredit dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Hartono, U., Subroto, B., Djumahir dan Irianto, G. 2013. Firm Characteristics, Corporate Governance and Firm Value. *International Journal of Business and Behavioral Sciences*. Vol. 3, No.8, pp. 9-18.
- Haryono, S.H. 2017. *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen AMOS LISREL PLS*. Jakarta: Luximo Metro Media.
- Hasan, Z. 2009. Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives. *International Review of Business Research Papers*. Vol.5 No.1. pp.277-293
- Hasan, Z. 2012. Review Corporate governance in Islamic financial institutions: An ethical perspective. *Prime Journals of Business Administration and Management (BAM)*. Vol. 2(1), pp. 405-411.
- Inderiantoro, N dan Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Khan, T dan Ahmed, H. 2001. Risk Management An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Jeddah Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute, Occasional Paper No: 5.

- Khanchel, Imen. (2007). Corporate governance: measurement and determinant analysis. *Managerial Auditing Journal*, Vol.22. No.8, pp. 740-760.
- Kasim, N., Htay, N.N dan Salman, S.A. 2013a. Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM Shari'ah Governance Guidelines. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 4 No. 15, pp. 220-227.
- Kasim, N., Htay, N.N dan Salman, S.A. 2013b. Conceptual Framework for Shari'ah Corporate Governance with Special Focus on Islamic Capital Market in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. Vol. 4, No. 5, pp, 336-339.
- Lang, M. dan Lundholm, R.. 1993. Cross-Sectional Determinants of Analyst Rating of Corporate Disclosures. *Journal of Accounting Research*. Vol.31, No. 2, pp. 246- 271
- Lee, E. dan Park, K.S. 2008. Determinan of The Corporate Governance of Koren Firms. *Corporate Ownership & Control*. Vol. 5, Issue 2. Pp. 15-23.
- Melyoki, L.L. 2005. *Determinants of Effective Corporate governance in Tanzania*. Desertasi. University of Twente.
- Mnasri, K. 2015. Ownership Structure, Board Structure and Performance in The Tunisian Banking Industry. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, Vol. 11, No. 2, pp. 57–82.
- Muhamad, R., Shahimi, S., Yahya, Y., dan Mahzan, N. 2009. Disclosure Quality on Governance Issues In Annual Reports of Malaysian PLCs, *International Business Research*, Vol. 2. No. 4., pp. 61-72.
- Muliawat, S. dan Khoiruddin, M. 2015. Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Management Analysis Journal*, 4 (1), hlm. 39-49
- Naser, K. 1998. Comprehensiveness of disclosure of non-financial companies: Listed on the Amman financial market. *International Journal of Commerce & Management* . Vol. 8, No. 1, pp. 88-119.
- Naser, K., Al-Khatib., K dan Karbhari, Y. 2002. Empirical Evidence on The Depth of Corporate Information Disclosure in Developing Countries: The Case of Jordan. *International Journal of Commerce & Management*. Vol. 12, No. 3 & 4, pp. 122-155.
- Nyor, T dan Mejabi, S.K. 2013. Impact of Corporate Governance on Non-Performing Loans of Nigerian Deposit Money Banks. *Journal of Business & Management*, Vo. 2, Issue 3, pp. 12-21.
- Othman, H.B. 2015. The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://www.researchgate.net/publication/281558705>
- Oliveira, L, Rodrigues, L.L. dan Craig, R. 2006. Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*. Vol. 10, No. 1, pp. 11-33.
- Poudel, R.P. dan Hovey, M. 2012. Corporate Governance and Efficiency in Nepalese Commercial Banks. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2163250> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2163250>
- Purnamasari, I. dan Darma, E.S. 2015. Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol. 16 No.1, hlm. 13-24.
- Rama, A dan Novela, Y. 2015. Syariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan*. Vol. 4, No. 2, hlm. 111-126.
- Ramli, N. M., Abdul Majid, A.S., Muhamed, N.A. dan Yaakub, N.A. 2014. Syariah Governance Disclosure Index and Institutional Ownership of Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference*. Kuala Lumpur.

- Raffournier, B. (1995). Deeterminans of Voluntary Financial Disclosure by Swiss Listed Company, *The European Accounting Review*, Vol. 4 No.2, pp. 261-280.
- Rinaningsih. 2008. Pengaruh Praktek Corporate Governance terhadap Resiko Kredit dan Yield Surat Hutang (Obligasi). *SNA XI*.
- Sudiyatno, B dan Fatmawati, A. 2013. Pengaruh Resiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Bank (Studi Empirik pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 9, No 1, hlm. 73-86.
- Shehu, U.H.. 2012. Firm Characeteristics and Financial Reporting Quality of Quoted Manufacturing Firm in Nigeria. a *Dissertation of Ahmadu Bello University, Zaria. Nigeria*.
- Siamat, D. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Silveira, A.D.M., Leal, R.P.C., Silva, A.L.C. dan Barros, C.L.A.B. 2007. Evolution and Determinants of Firm-Level Corporate Governance Quality in Brazil. *R.Adm.*, Sao Paolo, Vol. 44. No. 3, pp.173-189
- Setitik Nila di Perbankan Syariah. <http://stabilitas.co.id/home/detail/setitik-nila-di-perbankan-syariah>. 25 Nopember 2012.
- Ungureanu, M. 2013. Models and Practices of Corporate Governance Worldwide. *CES Working Papers*, pp. 625-635.
- Wallace, R. S. O, K. Naser dan A. Mora. 1994. The Relationship Between The Comprhensiveness of Corporate Annual Reports and Firm Characteristics in Spain. *Accounting and Business Research*. Vol. 25, No. 97, pp. 41-53.
- Wan Abdullaha, Wan A., Percyb, M. dan Stewartb, J. 2015. Determinants of voluntary corporate governance disclosure: Evidence from Islamic banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council regions. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. Vol. 11, Issue 3, pp. 262–279.
- Wardayati, S.M. 2011. Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo*, Vol.19, No., hlm. 1-24.
- Werapong, P, Dunstan, K., dan O'Hogartaigh, C. 2008. The determinants of corporate governance quality in Thailand. Paper presented at *the Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) conference*, Sydney, Australia
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS.2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yusoff, W. Fauziah dan Alhaji, I. Adamu. 2012. Insight of Corporate Governance Theories. *Journal of Business & Management*. Volume 1, Issue 1, pp. 52-63.